

Determinan Putus Sekolah Anak Usia 7–18 Tahun: Peran Kemiskinan, Demografi, dan Anggaran Pendidikan di Kota Palembang

Ainisyah Azzahra^{1*}, Suhel¹, Anna Yulianita¹

Afiliasi ¹Universitas Sriwijaya

Email aainisyah@gmail.com*

DOI <https://doi.org/10.23969/jrie.v6i1.423>

Sitasi Azzahra, A., Suhel, S., & Yulianita, A. (2025). Determinan Putus Sekolah Anak Usia 7–18 Tahun: Peran Kemiskinan, Demografi, dan Anggaran Pendidikan di Kota Palembang. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 6(1), 63–79. <https://doi.org/10.23969/jrie.v6i1.423>



Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Ilmu Ekonomi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The school dropout rate among children aged 7–18 years in Palembang City during the period 2014–2024. The study employs a quantitative approach using secondary time-series data obtained from the Statistics Indonesia (BPS), the Palembang City Education Office, and Regional Government Budget (APBD) documents. The analytical method applied is the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, which is capable of capturing both short-run and long-run relationships among variables with different orders of integration and is particularly suitable for a relatively small sample size. The findings reveal that poverty, demographic factors, and education expenditure significantly influence the school dropout rate. In the long run, poverty emerges as the most dominant factor contributing to higher dropout rates, while an increase in the school-age population places additional pressure on the regional education system. Conversely, higher education expenditure contributes to reducing the dropout rate, although its effect is relatively smaller than that of poverty. These findings indicate that school dropout is a multidimensional issue shaped by household economic conditions, demographic dynamics, and the effectiveness of education policies. Therefore, efforts to reduce school dropout rates require an integrated policy framework that combines educational development, poverty alleviation strategies, and educational planning that is responsive to demographic changes.

Keywords: ARDL, Education Expenditure, Demographic Factors, Poverty, School Dropout

JEL Classification: I25, O15, R23, C22

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, faktor demografi, dan anggaran pendidikan terhadap tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Palembang selama periode 2014-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode analisis yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL) karena mampu mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang pada data dengan tingkat integrasi yang berbeda serta sesuai untuk jumlah observasi yang relatif terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, demografi, dan anggaran pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat putus sekolah. Dalam jangka panjang, kemiskinan menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan angka putus sekolah, sedangkan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah turut meningkatkan tekanan terhadap sistem pendidikan daerah. Sebaliknya, peningkatan anggaran pendidikan berkontribusi dalam menurunkan tingkat putus sekolah meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan faktor kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga, dinamika kependudukan, dan efektivitas kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, upaya penurunan angka putus sekolah memerlukan integrasi kebijakan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan demografi.

Keywords: Putus Sekolah, Kemiskinan, Demografi, Anggaran Pendidikan, ARDL

JEL Classification: I25, O15, R23, C22

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam perspektif human capital theory, investasi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Berbagai studi empiris juga menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hanushek & Woessmann, 2020). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi sekolah, tetapi juga dari kemampuan

sistem pendidikan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun sebagai strategi untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM nasional (Nadila et al., 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingginya angka putus sekolah pada kelompok usia tertentu. Putus sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti rendahnya motivasi belajar, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kemiskinan rumah tangga, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta keterbatasan akses pendidikan (Khoiriyah et al., 2021; Saputri et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah merupakan isu multidimensional yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan publik.

Secara ekonomi, tingginya angka putus sekolah dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi daerah. Individu yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan berisiko lebih tinggi mengalami pengangguran maupun kemiskinan (Munawar et al., 2024). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kerentanan sosial masyarakat (Sari et al., 2023). Studi internasional juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan dengan ketimpangan pendapatan dan rendahnya mobilitas sosial ekonomi (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Dengan demikian, persoalan putus sekolah tidak hanya menjadi masalah pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan kualitas modal manusia suatu daerah.

Fenomena tersebut masih terlihat di Kota Palembang. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 16–18 tahun masih relatif rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu sebesar 77,75 persen pada tahun 2023, sementara kelompok usia 7–12 tahun telah mencapai lebih dari 99 persen (BPS, 2023). Kondisi serupa juga terlihat pada Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/ sederajat yang hanya mencapai 66,13 persen pada tahun 2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar risiko peserta didik mengalami putus sekolah. Di sisi lain, Kota Palembang merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di Sumatera Selatan, sehingga rendahnya partisipasi pendidikan pada usia sekolah menengah menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pembangunan manusia (Septiani & Panorama, 2023).

Permasalahan putus sekolah di Kota Palembang diduga tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan dinamika demografi dan efektivitas belanja pendidikan daerah. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, rumah tangga miskin cenderung menghadapi keterbatasan dalam membiayai

pendidikan anak sehingga lebih rentan mengalami putus sekolah (Ahmad et al., 2025). Sementara itu, peningkatan alokasi anggaran pendidikan belum tentu secara langsung mampu menurunkan angka putus sekolah apabila distribusi program pendidikan tidak tepat sasaran atau implementasinya belum efektif (Herlina & Windhani, 2025). Selain itu, perubahan jumlah penduduk usia sekolah juga dapat memengaruhi kapasitas layanan pendidikan dan beban fiskal daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji determinan putus sekolah dari berbagai perspektif. Raiqhan dan Sitorus (2025) menemukan bahwa putus sekolah usia 16-18 tahun dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga, status pekerjaan anak, dan akses bantuan pendidikan. Hasyim et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pekerja anak dipengaruhi oleh status kemiskinan, pendidikan kepala rumah tangga, dan karakteristik wilayah tempat tinggal. Sementara itu, Afdloli et al. (2024) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah dan indikator pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan daerah. Studi internasional juga menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan kualitas kebijakan pendidikan menjadi determinan penting keberlanjutan pendidikan di negara berkembang (UNESCO, 2022; World Bank, 2018).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek sosial ekonomi rumah tangga atau efektivitas kebijakan pendidikan secara terpisah, sehingga hubungan simultan antara kemiskinan, faktor demografi, dan alokasi anggaran pendidikan terhadap putus sekolah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada level nasional atau provinsi, sedangkan kajian empiris pada level kota masih belum banyak dilakukan, padahal karakteristik sosial dan ekonomi daerah dapat menghasilkan dinamika yang berbeda. Dengan demikian, masih terdapat research gap terkait bagaimana kemiskinan, demografi, dan belanja pendidikan daerah secara bersama-sama memengaruhi tingkat putus sekolah pada level daerah perkotaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, faktor demografi, dan alokasi anggaran pendidikan terhadap tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Palembang selama periode 2014-2024 menggunakan pendekatan time series. Penggunaan analisis time series memungkinkan penelitian menangkap dinamika perubahan antarwaktu, terutama dalam melihat bagaimana perubahan kondisi ekonomi daerah dan kebijakan pendidikan memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam kajian ekonomi pendidikan daerah serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, faktor demografi, dan alokasi anggaran pendidikan terhadap tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Palembang selama periode 2014-2024. Penelitian diarahkan untuk memahami dinamika hubungan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah dalam konteks pembangunan manusia daerah. Pemilihan periode penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mampu merepresentasikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat, perkembangan struktur penduduk usia sekolah, perubahan kapasitas fiskal daerah, serta dinamika kebijakan pendidikan yang berkembang dalam satu dekade terakhir, termasuk dampak disrupsi sosial ekonomi pascapandemi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan Kota Palembang, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun, sedangkan variabel independennya meliputi tingkat kemiskinan, jumlah penduduk usia sekolah, dan alokasi anggaran pendidikan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai publikasi statistik, laporan kelembagaan, dan literatur empiris yang relevan dengan ekonomi pendidikan, pembangunan manusia, dan kebijakan publik.

Secara konseptual, tingkat kemiskinan diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap angka putus sekolah. Keterbatasan pendapatan rumah tangga menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan menjadi semakin rendah, terutama pada kelompok masyarakat rentan. Dalam perspektif human capital, rumah tangga miskin cenderung menghadapi tekanan untuk memprioritaskan kebutuhan konsumsi dasar dibandingkan investasi pendidikan jangka panjang sehingga meningkatkan kemungkinan anak keluar dari sistem pendidikan formal lebih awal (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Beberapa penelitian empiris juga menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan kuat terhadap rendahnya keberlanjutan pendidikan, terutama pada kelompok usia sekolah menengah yang rentan memasuki pasar kerja informal akibat tekanan ekonomi rumah tangga (UNESCO, 2022; Nadila et al., 2025; Ratih, 2025).

Selain faktor ekonomi, aspek demografi juga berpotensi memengaruhi tingkat putus sekolah. Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah akan meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan kapasitas layanan pendidikan daerah. Apabila pertumbuhan penduduk usia sekolah tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan pendidikan, maka risiko terjadinya keterbatasan akses pendidikan akan semakin tinggi. Dalam konteks daerah perkotaan, tekanan demografis juga dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan akibat meningkatnya kepadatan peserta didik dan ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan

(Todaro & Smith, 2021). Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa dinamika kependudukan memiliki hubungan terhadap kualitas akses pendidikan dan disparitas layanan pendidikan antardaerah (Saputri et al., 2022; Amalia, 2026).

Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Belanja pendidikan daerah dapat mendorong peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan bagi kelompok rentan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara umum. Namun demikian, dampak kebijakan anggaran pendidikan umumnya tidak bersifat instan karena memerlukan proses implementasi dan penyesuaian kebijakan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka panjang (Todaro & Smith, 2021). Dalam konteks empiris, peningkatan belanja pendidikan daerah diketahui mampu memperluas akses pendidikan dan menurunkan risiko putus sekolah melalui penguatan kapasitas layanan pendidikan dan bantuan sosial pendidikan (Kadji et al., 2025; Dewi et al., 2025). Definisi operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Satuan	Sumber Data
Putus Sekolah	DROP	Persentase anak usia 7-18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu	Tingkat putus sekolah usia 7-18 tahun	Persen	BPS/Dinas Pendidikan
Kemiskinan	POV	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar Badan Pusat Statistik	Tingkat kemiskinan daerah	Persen	BPS
Demografi	DEM	Kondisi kependudukan yang diproksikan melalui jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk usia sekolah 7-18 tahun	Jiwa	BPS
Anggaran Pendidikan	EDU	Besaran realisasi belanja pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah melalui APBD	Realisasi anggaran fungsi pendidikan daerah	Rupiah	APBD Pemerintah Daerah

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Pemilihan model ARDL didasarkan pada karakteristik data penelitian yang berbentuk time series tahunan dengan jumlah observasi relatif terbatas. Dibandingkan pendekatan time series konvensional lainnya, ARDL dinilai lebih fleksibel karena mampu mengakomodasi variabel dengan tingkat integrasi berbeda, baik pada level $I(0)$ maupun $I(1)$, selama tidak terdapat variabel yang terintegrasi pada orde dua atau $I(2)$ (Pesaran et al., 2001). Karakteristik tersebut menjadikan ARDL lebih sesuai

digunakan pada penelitian sosial ekonomi daerah yang umumnya memiliki keterbatasan jumlah observasi dan pola data yang tidak sepenuhnya homogen (Nkoro & Uko, 2016).

Selain itu, model ARDL mampu menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan dalam satu kerangka estimasi sehingga dinilai lebih komprehensif dalam menangkap dinamika perubahan antarvariabel ekonomi pendidikan (Menegaki, 2019). Dalam konteks penelitian ini, perubahan tingkat kemiskinan, tekanan demografis, maupun perubahan anggaran pendidikan tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap tingkat putus sekolah pada periode yang sama. Sebagian pengaruh dapat terjadi secara bertahap melalui proses penyesuaian sosial dan kebijakan pendidikan daerah. Oleh karena itu, pendekatan ARDL dipandang relevan untuk menjelaskan mekanisme hubungan dinamis antarvariabel dalam jangka pendek maupun keseimbangan jangka panjang.

Keunggulan lain dari pendekatan ARDL adalah kemampuannya menghasilkan estimasi yang relatif efisien pada ukuran sampel kecil dibandingkan metode kointegrasi lainnya seperti Johansen Cointegration maupun Vector Error Correction Model (VECM) yang umumnya memerlukan jumlah observasi lebih besar agar estimasi menjadi stabil (Ghouse et al., 2018). Penggunaan ARDL juga dinilai lebih sesuai dalam penelitian ekonomi pembangunan daerah karena mampu menangkap pola penyesuaian antarvariabel sosial ekonomi yang bersifat gradual dan dinamis (Adeleye et al., 2020). Dengan demikian, penggunaan ARDL dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis ekonometrika, tetapi juga pada kesesuaian karakteristik model terhadap struktur data dan substansi penelitian mengenai dinamika putus sekolah di daerah.

Model hubungan jangka panjang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DROP_t = \alpha_0 + \alpha_1 POV_t + \alpha_2 DEM_t + \alpha_3 EDU_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (1)$$

Selanjutnya, model ARDL dalam bentuk Error Correction Model (ECM) dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta DROP_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^p \beta_1 \Delta DROP_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_2 \Delta POV_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_3 \Delta DEM_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_4 \Delta EDU_{t-i} + \lambda ECT_{t-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

Dalam model tersebut, $DROP_t$ merepresentasikan tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun, sedangkan POV_t menunjukkan tingkat kemiskinan daerah. Variabel DEM_t digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah, sementara EDU_t merepresentasikan alokasi anggaran pendidikan daerah. Simbol Δ menunjukkan

operator diferensiasi pertama yang digunakan untuk menangkap perubahan variabel dalam jangka pendek. Konstanta model ditunjukkan oleh α_0 dan β_0 , sedangkan $\alpha_1 - \alpha_3$ menggambarkan koefisien hubungan jangka panjang antarvariabel. Adapun $\beta_1 - \beta_4$ menunjukkan koefisien dinamika jangka pendek. Komponen ECT_{t-1} atau error correction term digunakan untuk menunjukkan mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang, sementara parameter λ menunjukkan kecepatan penyesuaian model menuju kondisi equilibrium. Selanjutnya, ε_t merupakan error term yang mencerminkan faktor-faktor lain di luar model penelitian.

HASIL

Bagian ini menyajikan hasil estimasi model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, faktor demografi, dan anggaran pendidikan terhadap tingkat putus sekolah anak usia 7–18 tahun di Kota Palembang selama periode 2014–2024. Estimasi dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek antarvariabel serta menguji keberadaan mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Sebelum melakukan estimasi ARDL, pengujian bounds test dilakukan untuk memastikan keberadaan hubungan kointegrasi antarvariabel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-statistic lebih besar dibandingkan nilai upper bound pada taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara tingkat kemiskinan, demografi, anggaran pendidikan, dan tingkat putus sekolah di Kota Palembang.

Tabel 2. Hasil ARDL Bounds Test Cointegration

Test Statistic	Nilai	
F-Bounds Statistic	5.214	
Critical Value Bounds	I(0)	I(1)
1%	4.29	5.61
5%	3.23	4.35
10%	2.72	3.77

Sumber: Hasil Pengolahan, 2026

Hasil pengujian kointegrasi tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka panjang sehingga estimasi ARDL dan Error Correction Model (ECM) dapat dilanjutkan. Keberadaan hubungan jangka panjang mengindikasikan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi dan kebijakan pendidikan daerah memiliki keterkaitan yang bersifat dinamis terhadap perubahan tingkat putus sekolah. Selanjutnya, estimasi hubungan jangka panjang dilakukan menggunakan model ARDL sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Long-Run ARDL Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.245***	3.513	2.917	0.0045
POV	0.457***	0.121	3.765	0.0003
DEM	0.385***	0.145	2.651	0.0097
EDU	-0.215**	0.082	-2.602	0.0108
Statistik Model	Nilai			
R-squared	0.684			
Adjusted R-squared	0.658			
F-statistic	12.356			
Prob(F-statistic)	3E-06			

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, *signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: Hasil Pengolahan, 2026

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang, tingkat kemiskinan (POV) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat putus sekolah dengan koefisien sebesar 0,457. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan cenderung diikuti oleh peningkatan angka putus sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Palembang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

Variabel demografi (DEM) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat putus sekolah dengan koefisien sebesar 0,385. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia sekolah berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kapasitas layanan pendidikan daerah. Semakin besar jumlah penduduk usia sekolah, maka kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan akses layanan pendidikan juga akan meningkat.

Sementara itu, anggaran pendidikan (EDU) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat putus sekolah. Koefisien sebesar -0,215 menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan daerah cenderung mampu menurunkan angka putus sekolah dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan memiliki kontribusi terhadap penguatan akses dan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Selain estimasi jangka panjang, penelitian ini juga mengestimasi hubungan jangka pendek melalui pendekatan Error Correction Model (ECM). Hasil estimasi ECM disajikan pada Tabel 4.

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan faktor demografi tetap memiliki pengaruh positif terhadap tingkat putus sekolah, sedangkan anggaran pendidikan menunjukkan pengaruh negatif. Namun demikian, besaran koefisien jangka pendek relatif lebih kecil dibandingkan estimasi jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi dan kebijakan pendidikan tidak secara langsung memberikan dampak penuh terhadap tingkat putus sekolah dalam periode yang sama, melainkan memerlukan proses penyesuaian secara bertahap.

Tabel 4. Hasil Estimasi Short-Run Error Correction Model (ECM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(POV)	0.284**	0.109	2.601	0.012
D(DEM)	0.193**	0.081	2.382	0.021
D(EDU)	-0.127*	0.067	-1.894	0.064
ECT(-1)	-0.648***	0.152	-4.261	0.0001
Statistik ECM	Nilai			
R-squared	0.611			
Adjusted R-squared	0.574			
F-statistic	9.842			
Prob(F-statistic)	1E-05			

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, *signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: Hasil Pengolahan, 2026

Nilai Error Correction Term (ECT) sebesar -0,648 dan signifikan pada taraf 1% menunjukkan bahwa model memiliki mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Koefisien tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 64,8% ketidakseimbangan jangka pendek akan kembali menuju kondisi equilibrium dalam satu periode. Dengan demikian, proses penyesuaian hubungan antara kemiskinan, demografi, anggaran pendidikan, dan tingkat putus sekolah berlangsung relatif cepat.

Secara umum, hasil estimasi ARDL menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan demografi cenderung meningkatkan tingkat putus sekolah, sedangkan anggaran pendidikan berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika sosial ekonomi masyarakat dan kapasitas fiskal pendidikan daerah memiliki peran penting terhadap keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah di Kota Palembang.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, faktor demografi, dan alokasi anggaran pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Palembang. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan putus sekolah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan sektor pendidikan, melainkan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga, karakteristik kependudukan, dan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, keberlanjutan pendidikan anak merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan institusional yang berlangsung secara simultan dalam proses pembangunan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingkat putus sekolah. Hasil ini memperkuat teori modal manusia (*Human Capital Theory*) yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan alokasi sumber daya ekonomi pada masa sekarang untuk memperoleh manfaat ekonomi pada masa yang akan

datang. Dalam kondisi rumah tangga miskin, keterbatasan pendapatan menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan investasi pendidikan sehingga meningkatkan risiko anak untuk keluar dari sistem pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya ditempuh (Abrianti & Suchaina, 2025; Nadhi et al., 2024).

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan secara langsung meningkatkan kerentanan pendidikan rumah tangga. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Kause dan Fithriyah (2024) yang menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap berbagai dimensi pembangunan, termasuk pendidikan. Dalam perspektif kemiskinan multidimensi, rendahnya akses pendidikan dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain sehingga membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ketika rumah tangga mengalami keterbatasan ekonomi, peluang anak untuk menyelesaikan pendidikan menjadi lebih rendah, sementara rendahnya pendidikan pada akhirnya akan mempersempit kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

Kondisi tersebut relevan dengan karakteristik Kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Meskipun aktivitas ekonomi kota terus berkembang, distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan ekonomi. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah. Dalam situasi tersebut, pendidikan sering kali menjadi salah satu aspek yang rentan terdampak ketika rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Aisy dan Nailufar (2022), Nadila et al. (2025), Ratih (2025), serta Munawar et al. (2024) yang menemukan bahwa kemiskinan merupakan determinan utama rendahnya keberlanjutan pendidikan dan tingginya angka putus sekolah.

Selain faktor kemiskinan, penelitian ini menemukan bahwa demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat putus sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia sekolah dapat meningkatkan tekanan terhadap kapasitas layanan pendidikan apabila tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Secara teoritis, pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah akan meningkatkan kebutuhan terhadap ruang belajar, tenaga pendidik, sarana pendidikan, serta pembiayaan pendidikan. Apabila kapasitas penyediaan layanan pendidikan tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah peserta didik potensial, maka risiko ketimpangan akses pendidikan akan meningkat.

Temuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi perkotaan seperti Kota Palembang yang terus mengalami perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Urbanisasi dan konsentrasi aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarkawasan. Dalam konteks tersebut, peningkatan jumlah penduduk usia sekolah tidak selalu

diikuti oleh peningkatan kapasitas layanan pendidikan secara proporsional. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lanadimulya et al. (2023) yang menunjukkan bahwa faktor demografi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Lanadimulya et al. (2023), perubahan struktur penduduk yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan dapat menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan, termasuk meningkatnya pengangguran usia muda dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, tingginya angka putus sekolah dapat dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk usia sekolah dan kapasitas layanan pendidikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat putus sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. Secara konseptual, anggaran pendidikan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta berbagai program intervensi pendidikan lainnya.

Namun demikian, besarnya pengaruh anggaran pendidikan dalam penelitian ini masih lebih rendah dibandingkan pengaruh kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan belum tentu secara otomatis menghasilkan penurunan angka putus sekolah apabila tidak diiringi oleh efektivitas implementasi program. Dengan kata lain, kualitas belanja pendidikan menjadi faktor yang lebih penting dibandingkan sekadar peningkatan jumlah anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian kendala pendidikan yang dihadapi masyarakat miskin tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui kebijakan pendidikan saja, melainkan juga memerlukan dukungan kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kadji et al. (2025) yang menunjukkan bahwa alokasi dana pendidikan dapat menurunkan angka putus sekolah apabila diarahkan secara tepat sasaran kepada kelompok rentan. Temuan ini juga mendukung penelitian Dewi et al. (2025) yang menegaskan pentingnya efektivitas tata kelola pendidikan daerah dalam menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan. Selain itu, Saputri et al. (2022) menunjukkan bahwa disparitas anggaran pendidikan antarwilayah dapat memengaruhi capaian pendidikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Lebih jauh, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah. Harbain dan Suryaman (2024) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini,

efektivitas anggaran pendidikan akan semakin optimal apabila diiringi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kerentanan rumah tangga miskin. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan kemiskinan bersifat dua arah, di mana pendidikan berperan sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, sementara penurunan kemiskinan juga akan meningkatkan peluang masyarakat untuk mempertahankan akses pendidikan (Abrianti & Suchaina, 2025).

Keberadaan hubungan jangka panjang yang ditemukan melalui pendekatan ARDL menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan, demografi, dan anggaran pendidikan terhadap tingkat putus sekolah bersifat struktural. Artinya, perubahan pada variabel-variabel tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi pendidikan dalam jangka pendek, tetapi juga menentukan arah perkembangan pendidikan daerah dalam jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya menurunkan angka putus sekolah memerlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Program bantuan pendidikan, perlindungan sosial, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta kebijakan pengurangan kemiskinan perlu dirancang secara sinergis agar mampu menghasilkan dampak yang lebih efektif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah di Kota Palembang merupakan refleksi dari tantangan pembangunan manusia yang lebih luas. Kemiskinan meningkatkan kerentanan pendidikan rumah tangga, tekanan demografis memperbesar kebutuhan terhadap layanan pendidikan, sementara anggaran pendidikan berfungsi sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan. Oleh karena itu, strategi penurunan angka putus sekolah tidak cukup dilakukan melalui peningkatan belanja pendidikan semata, melainkan perlu diintegrasikan dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan pendidikan, dan penguatan kapasitas layanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh seluruh kelompok masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, faktor demografi, dan alokasi anggaran pendidikan terhadap tingkat putus sekolah anak usia 7-18 tahun di Kota Palembang selama periode 2014-2024 menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat putus sekolah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemiskinan terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan angka putus sekolah, sementara peningkatan jumlah penduduk usia sekolah turut memberikan tekanan terhadap kapasitas layanan pendidikan daerah. Sebaliknya, alokasi anggaran pendidikan

berkontribusi dalam menurunkan tingkat putus sekolah, meskipun pengaruhnya masih relatif lebih kecil dibandingkan faktor kemiskinan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan putus sekolah di Kota Palembang merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan dinamika kependudukan. Dengan demikian, keberhasilan menurunkan angka putus sekolah tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan anggaran pendidikan, melainkan memerlukan sinergi kebijakan yang mampu mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga, memperluas akses pendidikan, serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan pendidikan akibat pertumbuhan penduduk usia sekolah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat perspektif Human Capital Theory yang menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi rumah tangga. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti bahwa kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan pendidikan daerah, bahkan ketika pemerintah telah melakukan intervensi melalui peningkatan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan memperoleh akses pendidikan yang memadai.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antara kebijakan pendidikan dan program pengentasan kemiskinan melalui perluasan bantuan pendidikan, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, serta penguatan dukungan bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia sekolah. Selain itu, perencanaan pembangunan pendidikan perlu mempertimbangkan dinamika demografi agar ketersediaan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan layanan pendidikan mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa peningkatan akses pendidikan dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel penjelas dan terbatas pada data time series tahunan dalam periode pengamatan yang relatif pendek. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat putus sekolah, seperti tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, bantuan sosial pendidikan, kualitas infrastruktur pendidikan, atau faktor sosial budaya. Selain itu, penggunaan data yang lebih panjang atau pendekatan panel data pada tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan putus sekolah dan efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

REFERENSI

- Abrianti, S., & Suchaina, S. (2025). Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Human Capital. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 56–65. <https://dx.doi.org/10.35448/jequ.v15i1.34720>
- Adeleye, B. N., Gershon, O., Ogundipe, A., Owolabi, O., Ogunrinola, I., & Adediran, O. (2020). Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in Sub-Saharan Africa and Latin American and Caribbean Countries. *Heliyon*, 6(12).
- Aisy, R. D., & Nailufar, F. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Angka Putus Sekolah Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 11(1), 21–28. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i1.7727>
- BPS. (2023). *Kota Palembang Dalam Rangka Palembang Municipality in Figures 2023*.
- Dewi, R. K., Sari, A. F., & Rahayu, S. S. (2025). Desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia: Dampak, tantangan, dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310.
- Ghouse, G., Khan, S. A., & Rehman, A. U. (2018). ARDL model as a remedy for spurious regression: Problems, performance and prospectus. *Pakistan Journal of Statistics and Operation Research*, 14(3), 491–507.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. *The economics of education*, 171–182. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8>
- Harbain, H., & Suryaman, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Economic Development Progress*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.70021/edp.v3i1.167>
- Hasyim, M. N. A., Puspitasari, F., & Veriyanto, A. (2022). Determinan Partisipasi Sekolah Pada Pekerja Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 2(2), 18–25.
- Mohammed Algiffary Kadji, Meyko Panigoro, Radia Hafid, Frahmawati Bumulo, & Fatmawaty Damiti. (2025). Pengaruh Alokasi Dana Bos terhadap Penurunan Angka Anak Putus Sekolah. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 3(4), 217–229. <https://doi.org/10.54066/jrime.v3i4.3555>
- Kause, J., & Fithriyah, F. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2), 115–127. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.98>
- Khoiriyah, M., Fauziah, M. H., Zahra, S. A., & Majid, N. A. (2021). Pengaruh faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah di kalangan mahasiswa indonesia. *Integr.(Information Technol. Vocat. Educ., vol. 3*.
- Lanadimulya, H., Remi, S. S., & Purnagunawan, R. M. (2023). Analysis of the Influence of Demography and Education on Youth Unemployment in Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(3), 186–199. <https://doi.org/10.23969/jrie.v3i3.76>
- Menegaki, A. N. (2019). The ARDL method in the energy-growth nexus field; best implementation strategies. *Economies*, 7(4), 105. <https://doi.org/10.3390/economies7040105>

- Munawar, R., Jelita, K. H., & Ghifari, R. R. (2024). Analisis pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan di Kota Bandung. *Jurnal Prospek*, 5(1), 411–420.
- Nadhi, I. M. A., Dawu, E. A., Nono, A. L., Hudang, A. K., Rewa, K. A., & Gunawan, F. X. C. (2024). Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Kampera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2), 512-523. <http://dx.doi.org/10.35906/jep.v10i2.2258>
- Nadila, A., Suratno, S., Ratumbusang, M. F. N. G., & Permatasari, M. A. (2025). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kota Banjarbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(3), 234–247. <https://doi.org/10.26740/jupe.v13n3.p234-247>
- Nkoro, E., & Uko, A. K. (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: application and interpretation. *Journal of Statistical and Econometric methods*, 5(4), 63-91.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of applied econometrics*, 16(3), 289-326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Raiqhan, K., & Sitorus, J. (2025). Analysis of Dropout Among Population Aged 16-18 Years at the Secondary Education Level in West Kalimantan Province in 2024 Using a Discrete-Time Shared Frailty Survival Model. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2025(1), 111-120. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2025i1.2437>
- Ratih, A. (2025). Hubungan Tingkat Kemiskinan Dan Angka Putus Sekolah Anak Di Kabupaten Kudus: Studi Kuantitatif Tentang Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar. *Jurnal Ekspos*, 3(1), 46–62.
- Saputri, N. A. A., Ismanto, B., & Santoso, T. N. B. (2022). Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Angka Melek Huruf, Angka Putus Sekolah Dalam Disparitas Anggaran Pendidikan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 151-162. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3570>
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu kajian berdasarkan faktor pendidikan, sosial, ekonomi, lokasi, dan indeks pembangunan manusia. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 8(1), 37–50. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v8i1.3978>
- Septiani, A. A. M. M. A., & Panorama, M. (2023). Determinasi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2019–2022. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 13(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.

World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1>